

# **PERKEMBANGAN INDUSTRI GULA DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 1859-1900**

Oleh: Muchammad Veriyanto  
NIM. 11407144012

## **Abstrak**

Peralihan kebijakan dari penanaman paksa menjadi penanaman bebas pada tahun 1870 menarik perusahaan swasta untuk menanamkan modal. Salah satu bisnis yang berkembang pada masa itu ialah industri gula. Sidoarjo sebagai salah satu daerah penghasil gula terbesar pada masa itu menjadikan tempat ini sebagai tujuan investor asing untuk menanamkan modalnya melalui bisnis perkebunan tebu dan pabrik gula. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah kolonial terhadap perekonomian dalam bidang industri gula, khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis dengan empat tahapan penelitian sejarah. Pertama, heuristik yang berupa pengumpulan sumber-sumber sejarah dalam bentuk tulisan yang otentik. Kedua ialah kritik, yaitu melakukan kritik atau pemeriksaan terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan, baik dari isi maupun kondisi fisiknya. Ketiga, interpretasi, mencari fakta-fakta sejarah yang ada pada sumber sebagai tujuan untuk relevansi penulisan. Keempat, historiografi, yaitu penyampaian melalui tulisan berdasarkan fakta sejarah yang diangkat dari sumber-sumber terkait yang telah melalui proses kritik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan politik ekonomi liberal yang dicetuskan pada tahun 1870 telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan industri gula di Sidoarjo, namun ternyata perkembangan tersebut belum mampu memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Terbukti dengan adanya konflik antara penguasa dan rakyat pribumi sebagai kaum pekerja, yaitu para pekerja perkebunan dan buruh pabrik sebagai dampak dari kebijakan pemerintah kolonial. Kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah tersebut hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan swasta asing.

**Kata Kunci:** *Industri, Gula, Sidoarjo.*

## **The Sugar Industry Development in Sidoarjo Regency at 1859–1900**

By: Muchammad Veriyanto  
NIM. 11407144012

### **Abstract**

The policy transfer from force planting became free planting at 1870 drew the private business to invest the financial capital. One of the business which developed at that year was sugar industry. Sidoarjo was became one of the region that produced the biggest sugar at that years, became the object of foreign investors to invest their financial capitals for sugar cane plantation and to process sugar factories. The purpose of this writing was knowing the effect of colonial policy government for economy exactly the sugar industry in Sidoarjo regency.

This research used the critical history methods which consist of four steps history research. First, the heuristic consist of aggregation the histories sources which form as the authentic writing. Second, the critical, exactly did the critical or investigated to the sources which was found from the contents, although the physical condition. Third, interpretation looked for the histories facts which was found to relevance writing. Fourth, historiography extended writing be based on the histories facts which raised from the related sources that passed through the critical processes.

The results of this research indicated unconventional economic politics which was said at 1870 gave the effect for sugar industry development in Sidoarjo, but at the fact that development didn't give the effect for prosperity citizenry. It was proofed with the conflicts between rulers and indigene citizenry which became worker groups, exactly the plantantation worker and the factory workers as the effect of colonils policy government. The policy that was formed by the government only gived the profit for foreign privat factories.

**Keywords:** Industry, Sugar, Sidoarjo

## **A. Pendahuluan**

Industri gula di Indonesia telah dimulai sejak VOC menguasai wilayah Hindia Belanda dan ketika VOC dibubarkan, pemerintah Hindia Belanda meningkatkan penanaman tebu dengan didukung kebijakan tanam paksa yang diterapkan pada tahun 1830. Seiring dengan adanya perluasan penanaman yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, terdapat beberapa pabrik yang saat itu beroperasi dengan menggunakan peralatan-peralatan pabrik gula yang lebih modern, sehingga produksi gula mengalami peningkatan.<sup>1</sup> Pemerintah kolonial memegang peranan penting dalam kemajuan ini, pada sektor ekonomi perkebunan pemerintah menuntut produksi komoditi ekspor secara besar-besaran, sehingga produksi ini telah menghasilkan keuntungan.

Masuk dan berkembangnya industri gula di Sidoarjo tidak lepas dari peran pemerintah dalam membuat suatu kebijakan. Segala bentuk keputusan yang sekiranya dapat memberikan keuntungan besar oleh pemerintah kolonial akan diterapkan sesuai dengan tujuannya. Sejak tahun 1800 pemerintah kolonial mengubah cara eksploitasi dari cara lama yang konservatif dengan memusatkan perhatian pada perdagangan menjadi eksploitasi yang dikelola oleh pemerintah dan swasta dengan cara melakukan pemanfaatan produksi, yaitu tanah dan tenaga kerja dari setiap wilayah terutama yang memiliki kesuburan lahan yang sangat baik untuk ditanami tanaman komoditas seperti tebu yang membawa keuntungan lebih bagi negara dan berimbas pada

---

<sup>1</sup> Mubyarto, *Masalah Industri Gula di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 1984), hlm. 3-5.

pemaksaan kerja pada penduduk pribumi oleh pemerintah kolonial yang bertujuan membuka Jawa untuk perdagangan dunia dan mendapatkan komoditi ekspor yang lebih serta pengaturan dengan cara modern melalui birokrasi dengan mengelola aset tanah yang dimiliki oleh rakyat dengan cara kontrak tanah yang dilakukan oleh pengusaha kepada penduduk pribumi.<sup>2</sup> Kontrak tanah yang dilakukan sebenarnya merupakan bentuk kerja sama pemerintah dan swasta untuk mendukung kelancaran dari kebijakan tersebut.

Sistem tanam paksa yang ditetapkan tahun 1830, pada dasarnya merupakan suatu penghidupan kembali sistem eksploitasi yang saat itu bernama sistem penyerahan wajib. Mengenai pelaksanaannya, pemerintah menghendaki campur tangan orang-orang Eropa dalam proses produksi. Apabila dalam sistem sewa tanah terdapat pemisahan antara pemerintah dan kehidupan perusahaan, maka akan dilakukan penyatuan kembali antara pemerintah dan perusahaan dalam menangani produksi tanaman ekspor. Pemerintah mengorganisir proses penanaman melalui birokrasinya, sedangkan para pengusaha barat yang memiliki modal besar ditugaskan untuk menangani produksi di pabrik-pabrik pengolahan.<sup>3</sup> Sebelum adanya sistem ekonomi liberal di Hindia Belanda, perusahaan asing sudah lebih dulu melakukan penanaman modal dan mengolah hasil perkebunan ke dalam pabrik-pabrik. Salah satu hasil perkebunan tersebut ialah tanaman tebu.

---

<sup>2</sup> Suhartono, *Bandit-Bandit Pedesaan: Studi Historis 1850-1942 di Jawa*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hlm. 1-2.

<sup>3</sup> Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991, hlm. 53-55.

Penghapusan sistem tanam paksa pada tahun 1870 membawa perkembangan sendiri bagi industri gula di Sidoarjo, karena sistem ekonomi liberal sebagai pengganti kebijakan tanam paksa menjadi sebuah kebijakan yang menarik investor asing untuk ikut dalam mengelola industri gula. Peraturan ini dikuatkan dengan terbentuknya Undang-Undang Gula dan Undang-Undang Agraria sebagai legalitas dan menjamin bagi para pengusaha swasta untuk melakukan investasi dalam industri gula. Sistem tersebut membawa pengaruh bagi kehidupan sosial ekonomi di Sidoarjo, karena merupakan suatu periode kolonial yang melibatkan pengusaha swasta dalam proses peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan, sistem penggunaan tanah maupun persewaan tanah merupakan hal yang harus dikembangkan, bersama dengan itu pula penggunaan eksploitasi sumber daya manusia seperti buruh atau tenaga kerja juga dimaksimalkan.<sup>4</sup> Tenaga kerja banyak terserap di perkebunan-perkebunan tebu dan pabrik gula, sebagaimana di Sidoarjo saat itu industri gula menjadi salah satu pilihan utama dalam bekerja.

## **B. Kondisi Umum Kabupaten Sidoarjo**

Secara geografis Kabupaten Sidoarjo terletak di pantai utara Provinsi Jawa Timur, terletak antara 112,5° dan 112,9° Bujur Timur dan di sebelah selatan khatulistiwa antara 7,3° dan 7,5° Lintang Selatan. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten

---

<sup>4</sup> Mubyarto dkk, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan*, (Yogyakarta: Aditya Media. 1992), hlm. 3-4.

Pasuruan, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan bagian Timur berbatasan dengan Selat Madura.<sup>5</sup> Pada awalnya Kabupaten Sidoarjo bernama Sidokarie yang dipimpin oleh seorang patih bernama R. Ng. Djojohardjo, bertempat tinggal di kampung Pucang Anom. Patih ini dibantu oleh seorang wedana yang bernama Bagus Ranuwiryo, bertempat tinggal di kampung Panggabahan yang pada saat itu Sidokarie merupakan bagian dari Kabupaten Surabaya. Terlalu luasnya wilayah Kabupaten Surabaya, sehingga pemerintah kolonial sulit untuk melakukan kontrol wilayah yang menyebabkan timbulnya pemberontakan menjadi salah satu alasan pemerintah memisahkan wilayah Sidokarie dari Kabupaten Surabaya dan membentuk Sidokarie menjadi Kabupaten dan mengubah nama menjadi Sidoarjo sebagai kabupaten di wilayah Keresidenan Surabaya.<sup>6</sup> Pembentukan itu diatur pada lembaran negara Hindia Belanda pada 31 Januari 1859, no. 9, *Staatsblad no. 6* yang menyatakan daerah Kabupaten Surabaya dibagi menjadi dua, yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokarie, wilayahnya berupa distrik Djenggolo I, Djenggolo II, Djenggolo III, dan Djenggolo IV, serta Rawapoeloe I dan Rawapoeloe II.<sup>7</sup> Adanya surat keputusan ini maka pada tahun 1859 tidak lagi menjadi bagian dari Kabupaten Surabaya. Sejak saat itu telah diangkat seorang Bupati untuk memimpin

---

<sup>5</sup> Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, *Potensi Kabupaten Sidoarjo*, (Sidoarjo: Hubungan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo, 1994), hlm. 9

<sup>6</sup> Tim Penelusur Sejarah Sidoarjo, *Jejak Sidoarjo: dari Jenggala ke Suriname*, (Sidoarjo: Ikatan Alumni Pamong Praja Sidoarjo, 2006), hlm. 38.

<sup>7</sup> *Staatsblad van Nederlandsch Indie, Splitsing van het Regentschap Soerabaija in Twee Regentschappen*, 1859, no. 6a, hlm. 1.

Kabupaten Sidokarie yaitu R. Notopuro (R.T.P. Tjokronegoro) yang berasal dari Kasepuhan, putra dari R.A.P. Tjokronegoro, Bupati Surabaya dan bertempat tinggal di kampung Pandean. Pembangunan masjid di Pekauman atau Pandean merupakan penandaan masa pemerintahannya yang terus mengalami perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>8</sup> Pada tahun itu juga nama Sidokarie diubah menjadi Sidoarjo berdasarkan surat keputusan ini terdapat pada lembaran negara Hindia Belanda pada 28 Mei 1859, no 10, *Staatsblad no. 32*.<sup>9</sup> Adanya peraturan ini, maka Sidoarjo resmi berdiri sebagai salah satu kabupaten yang ada di Keresidenan Surabaya.

### **C. Perkembangan Industri Gula di Kabupaten Sidoarjo**

Pada tahun 1891 penanaman perusahaan atas tanah-tanah rakyat yang disewa meliputi hampir tiga per empat dari keseluruhan penanaman tebu,<sup>10</sup> sehingga Jawa mampu menghasilkan gula dalam jumlah yang sangat banyak dengan kualitas terbaik. Produksi gula berkembang sangat cepat, dari 752.657 *pikul*<sup>11</sup> pada tahun 1840 hingga mencapai 1.764.505 *pikul* di tahun 1860 dengan fluktuasi laba antara 280.780 sampai

---

<sup>8</sup> Tim Penelusur Sejarah Sidoarjo, *op.cit.*, hlm. 39.

<sup>9</sup> *Staatsblad van Nederlandsch Indie, Bepaling, dat het Regentschap Sidhokarie (Residentie Soerabaija) voortaan den Naam Zal Voeren van Sidho-Ardjo*, 1859, no. 32, hlm. 8-9.

<sup>10</sup> D. H.Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, (terj. Prajudi Atmosudirjo), ( Djakarta: Pradnja Paramita, 1957), hlm. 252.

<sup>11</sup> *Pikul* merupakan satuan ukuran berat. 1 *pikul* sama dengan 61,76 kilogram.

453.656 *gulden* pertahunnya.<sup>12</sup> Strategi ekonomi pemerintah yang diterapkan berjalan cukup baik, meskipun sejak awal penanaman tebu ditangani oleh pemerintah dan swasta masih banyak menemui pasang surut. Tabel di bawah ini menjelaskan luas penanaman tebu di Sidoarjo pada tahun 1859.

Tabel 1  
Luas Penanaman Tebu di Sidoarjo Tahun 1859

<b>Nama Pabrik</b>	<b><i>per bau/ha</i></b>
Ketegan	64
Sroeni	14
Tjandi	64
Krian	55
Watoetoelis	14
Tangoelangin	93
Waroe	40
Total	344

Sumber: ANRI, *Inventaris Arsip Keresidenan Surabaya (1816) 1817-1860 (1894)*, *Bijlage suikercultuur fabriek Sidhoardjo*, Jakarta, 2010.

Untuk penanaman tebu di Sidoarjo hampir semua desa menyewakan tanahnya selama 6½ tahun. Sepertiga tanah-tanah yang disewakan itu setiap tahunnya digunakan untuk penanaman tebu. Harga sewa sebesar f.40-f.50 per *bau*, besar harga sewa ini sama

<sup>12</sup> Tim Penelusur Sejarah Sidoarjo, *op. cit.*, hlm. 65.

dengan besar jumlah pajak tanah yang harus dibayar, sehingga perusahaan tebu langsung membayarkannya kepada kepala desa kecuali di tiga pabrik, yakni Buduran, Ketegan, Sruni. Harga sewa tanah di tiga pabrik ini adalah sebesar f.32,5-f.40 per *bau*. Berbeda dengan pabrik-pabrik yang lain, di wilayah tiga pabrik ini pembayaran dilakukan sekaligus sebelum penyewaan berjalan tanpa memperhatikan pajak tanah yang harus dibayar setiap desa, selain di desa setiap kepala desa juga mendapatkan uang komisi dari penyewaan yang ada di wilayahnya. Uang komisi untuk kepala desa di wilayah tiga pabrik ini adalah sebesar f.2,50.<sup>13</sup> Untuk produksinya terdapat kenaikan yang sangat pesat dalam jumlah produksi gula antara tahun 1870 dan 1885. Pada tahun 1870 produksi gula berjumlah 152.595 ton dan tahun 1885 memproduksi 380.346 ton gula.<sup>14</sup> Tabel di atas ini memberikan gambaran mengenai total produksi gula dalam setiap pabrik gula yang ada di Sidoarjo dalam beberapa tahun yang dikutip dari laporan kolonial Belanda di tahun-tahun tertentu. Berkembangnya industri gula tentu saja meningkatkan penghasilan bagi perusahaan swasta dengan banyaknya jumlah produksi dan lebih mengusahakan penanaman perkebunan tebu maupun pabrik-pabrik gula di Sidoarjo. Keresidenan Surabaya menjadi penghasil terbesar di Jawa Timur dengan banyaknya pabrik gula yang beroperasi di beberapa wilayah seperti Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya, dan Jombang sebagai wilayah utama

---

<sup>13</sup> Nasution, "Perkembangan Ekonomi Keresidenan Surabaya 1830-1930" ,*Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1998), hlm. 127.

<sup>14</sup> Bernard, H. M. Vlekke, *Nusantara: Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), hlm. 346-347.

Tabel 2.  
Total Produksi Gula Setiap Pabrik di Sidoarjo

Distrik	Pabrik	Total Produksi 1885 (dalam <i>pikul</i> )	Total Produksi 1886 (dalam <i>pikul</i> )	Total Produksi 1888 (dalam <i>pikul</i> )	Total Produksi 1891 (dalam <i>pikul</i> )	Total Produksi 1899 (dalam <i>pikul</i> )
Djenggolo I	Waroe	44.324	33.280	38.319	41.001	62.000
	Sroeni	45.728	41.782	48.970	65.266	77.584
Djenggolo II	Boedoeran	47.496	37.209	43.690	39.643	70.000
	Tjandi	39.549	31.122	33.861	49.682	44.000
Djenggolo III	Balongsendo	51.150	55.300	66.567	67.885	65.066
Djenggolo III dan IV	Krian	65.160	60.900	57.634	78.842	76.300
Djenggolo I dan IV	Ketegan	46.945	39.623	46.500	52.049	101.100
Djenggolo II dan Rawapoeloe I	Tanggoelangin	32.3111	32.657	40.797	47.836	87.728
Rawapoeloe I	Porrong	35.999	36.000	45.050	60.500	46.380
Rawapoeloe I dan II	Kremboeng	50.454	40.014	50.551	64.958	66.000
Rawapoeloe II	Watoetoelis	56.060	57.047	60.963	61.800	77.000
Rawapoeloe II	Toelangan	-	-	-	-	70.000
	Total produksi per tahun	515.1761	464.934	532.902	629.462	843.158

Sumber: *Kolonial Verslag* 1886, 1887, 1889, 1891 dan 1900, *Bijlage C, Kolonial Verslag Suikercultuur op Java*.

dalam penanaman dan produksi di Keresidenan Surabaya dengan didukung tenaga kerja yang bermigrasi dari wilayah Madura dan sekitarnya.

Tahun 1850 perluasan tanaman wajib secara teratur diakhiri, namun beban kerja wajib masih tetap memberatkan penduduk, sebagai contoh kasus di wilayah Sidoarjo. Pada tahun 1863, ketika asisten residen Sidoarjo diberi wewenang untuk memulai penggilingan gula, setiap hari terjadi penyetoran tenaga paksaan untuk kepentingan pabrik-pabrik gula di Sidoarjo. Para pekerja ini berasal dari daerah desa-desa, ada yang dari penduduk asli Sidoarjo dan ada pula yang berasal dari kaum pendatang. Setiap hari mereka dipekerjakan untuk kegiatan pabrik gula, mulai dari produksi, penggilingan, serta pengangkutan tebu yang terdapat di 11 pabrik gula di Sidoarjo. Jumlah pekerja untuk 11 pabrik gula di Sidoarjo sebanyak 1.890 orang per hari.<sup>15</sup> Tenaga kerja untuk pabrik gula terkadang hanya diberi upah yang tidak layak dengan jasa mereka, perusahaan hanya memikirkan reputasi mereka daripada kesejahteraan petani. Pembayaran untuk gula seringkali dihitung menurut jumlah yang diproduksi pabrik dan bukan menurut tebu yang dipasok dan banyak petani menerima pembayaran sedikit atau tidak sama sekali untuk kerja mereka.<sup>16</sup>

Kewajiban di pihak kaum tani untuk menyerahkan jasa tenaga kerjanya terus berlanjut sampai sesudah tanaman paksa ekspor dihapus dengan seperti ini

---

<sup>15</sup> Nasution, *op. cit.*, hlm. 205-206.

<sup>16</sup> J. S. Furnivall, *Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk*, (Jakarta: Freedom Institut, 2009), hlm. 146.

pemerintah dapat membangun infrastruktur maupun sarana yang lainnya, karena tenaga rakyat yang dianggap murah dan bahkan tidak dibayar sekalipun.<sup>17</sup>

Tabel 3.  
Jumlah Pekerja Setiap Pabrik Gula di Sidoarjo Tahun 1863.

<b>Pabrik Gula</b>	<b>Jumlah Orang</b>
Candi	140
Boedoeran	170
Waroe	220
Porrong	140
Tanggoelangin	140
Watoetoelis	190
Ketegan	220
Balongsendo	160
Sroeni	200
Krian	200
Kremboeng	110

Sumber: Nasution, "Perkembangan Ekonomi Keresidenan Surabaya 1830-1930", *Tesis*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1998).

Kerja upah setelah sistem ekonomi liberal lebih banyak terjadi di Sidoarjo karena merupakan suatu konsekuensi dari kebijakan-kebijakan kolonial yang menciptakan kaum pekerja. Pada abad ke-19, keharusan bagi adanya tenaga kerja

---

<sup>17</sup> Jan Breman, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 7.

paksa semata-mata adalah akibat dari kenyataan bahwa tidak mungkin mendapatkan orang untuk bekerja dengan upah dalam proyek-proyek pemerintah kolonial.<sup>18</sup> Tabel di bawah ini merupakan upah harian rata-rata perkebunan tebu pada tahun 1880. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan upah buruh pada tahun 1900-an. Kondisi ini disebabkan oleh krisis gula yang terjadi pada 1884 dan selama itu pemerintah kolonial belum dapat mengembalikan perekonomian gula saat sebelum krisis terjadi.

#### **D. Dampak Perkembangan Industri Gula di Sidoarjo**

Pada umumnya masuknya industri gula di sebuah daerah akan memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi penduduknya. Industri gula merupakan pertanda mobilitas yang tinggi dan merupakan cerminan dari pasar tenaga kerja yang dinamis.<sup>19</sup> Di Distrik Gedangan, Sidoarjo terdapat perluasan perkebunan yang memakan tanah luasnya sekitar 1.744.950 m<sup>2</sup>. Luas areal itu hampir 93,04 persen dari luas Distrik Gedangan. Jika industri gula umumnya dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat desa di Jawa, namun tidak dengan masyarakat yang berada di

---

<sup>18</sup> Svein Ass, “Relevansi Teori Makro Chayanov Untuk Kasus Pulau Jawa” dalam Soediono M. P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm.131.

<sup>19</sup> Thomas J. Lindblad, “Tema-Tema Kunci dalam Sejarah Ekonomi Modern Indonesia” dalam Thomas J. Lindblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2000) hlm. 18.

Distrik Gedangan. Perekonomian rakyat di daerah tersebut hanya bersifat semu, karena penghidupan masyarakat lebih ditentukan oleh nilai kredit.<sup>20</sup>

Perluasan penanaman dan pembukaan lahan yang disebabkan oleh banyaknya pabrik gula di Sidoarjo membuat tanah untuk pemukiman menjadi sempit. Muncul suatu pandangan tentang dampak sosial ekonomi pabrik gula di Sidoarjo yang menurut salah seorang mantan kontrolir di daerah Prambon, juga kontrolir dari Gedangan, dan pengurus Sindikat Pemilik Pabrik Gula Jawa (*Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlandsch-Indie*) bahwa terjadi pengaruh yang buruk bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Sidoarjo diakibatkan oleh banyaknya pabrik gula yang ada dalam satu wilayah kabupaten dan banyak menempati tanah pemukiman penduduk akibat perluasan yang terjadi.<sup>21</sup> Di wilayah Sidoarjo hampir tidak terdapat hutan begitu juga dengan kabupaten-kabupaten yang berada di Keresidenan Surabaya seperti Mojokerto, Jombang dan Surabaya karena perluasan perkebunan tebu. Di Sidoarjo petani yang menguasai sawah 1 *bau* mencapai hampir 90%. Pada umumnya, 1 *bau* sudah dianggap sebagai ukuran minimal untuk mempertahankan ekonomi rumah tangga dan juga ukuran maksimal yang dapat digarap suatu keluarga pada waktu itu. Seorang Sarjana Jepang, Fukazawa Hachiro mengatakan bahwa ini terjadi karena pada abad ke-19 tidak ada lagi tanah baru yang

---

<sup>20</sup> Sarjana Sigit Wahyudi, "Perkebunan Tebu dan Perubahan Sosial di Keresidenan Surabaya 1890-1937" *,Disertasi*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005), hlm. 233-235.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 259-261.

dapat dibuka, meskipun penduduk bertambah dengan cepat. Jumlah penduduk di Jawa telah meningkat pada abad ke-19 dan menyangkut hutan yang akan dibuka, penyelidikan tahun 1863 menunjukkan memang tidak ada hutan di daerah Sidoarjo.<sup>22</sup> Akibat dari adanya itu semua timbul suatu perlawanan oleh masyarakat Sidoarjo, agar menuntut untuk dapat berlaku adil terhadap kaum pribumi.

### **E. Kesimpulan**

Ambisi pemerintah kolonial Belanda untuk memperbesar keuntungan dari hasil perkebunan sangatlah besar. Politik ekonomi liberal merupakan salah satu bukti usaha pemerintah kolonial untuk dapat memperbesar keuntungan dari hasil perkebunan. Sejak diterapkannya kebijakan ini, hasil-hasil dari pertanian dan perkebunan menjadi lebih menguntungkan dan hasil produksi dari tanaman tebu semakin meningkat, karena politik pintu terbuka yang dijalankan menyebabkan masuknya perusahaan swasta asing. Salah satu komoditas perkebunan yang mendapat perhatian dari pemerintah adalah tanaman tebu yang banyak ditanam di wilayah Jawa Timur karena kecocokan dari kesuburan tanah yang terdapat di wilayah-wilayah tersebut, meskipun wilayah lainnya seperti Kabupaten Mojokerto, Surabaya, dan Jombang juga mendapat perhatian sendiri dari pemerintah dalam hal perkebunan

---

<sup>22</sup> Uemura Yasuo, "Perkebunan Tebu dan masyarakat pedesaan di Jawa" dalam Akira Nagazumi, *Indonesia dalam kajian sarjana jepang: perubahan sosial ekonomi abad XIX dan XX dan berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), hlm. 58-59.

tebu. Tentunya ini membawa keuntungan sendiri dari produksinya, karena semakin banyak pabrik akan semakin besar produksi yang dihasilkan.

Pada masa liberal industri gula di Sidoarjo mengalami perkembangan yang sangat pesat dari hasil produksinya. Salah satu faktor penting penyebab majunya industri gula di Sidoarjo ialah pelaksanaan Undang-Undang Agraria yang membuka Jawa bagi perusahaan asing dan munculnya Undang-Undang Gula yang memberikan perlindungan dan keuntungan dari produksi gula karena tebu sebagai bahan baku utama gula hanya boleh di proses di dalam negeri yang sangat menguntungkan bagi perusahaan swasta yang memegang kendali pabrik-pabrik pengolahan tebu di Sidoarjo. Adanya undang-undang ini menyebabkan pengelolaan perkebunan maupun pabrik-pabrik gula mulai dikendalikan oleh perusahaan swasta, karena sesuai dengan peraturan kebijakan ekonomi liberal yang sudah disepakati, pemerintah harus menarik diri untuk tidak lagi campur tangan dalam pengelolaan perkebunan. Selain dari peran pemerintah melalui kebijakannya, Sidoarjo juga memiliki faktor lain yang mendukung kemajuan berkembangnya industri gula, yaitu faktor alam yang mendukung dalam penanaman tebu dengan pemanfaatan lahan-lahan, sehingga investor asing mulai masuk dengan kekuatan hukum yang memberi jaminan kepada pengusaha swasta untuk menyewa tanah untuk dijadikan lahan perkebunan terutama perkebunan tebu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip dan Terbitan Resmi

ANRI, *Inventaris Arsip Keresidenan Surabaya (1816) 1817-1860 (1894), Bijlage suikercultuur fabriek Sidhoardjo*, Jakarta, 2010.

*Bijlagen van het Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1882-1883, Bijlage C, Kolonial Verslag van 1882, Suikercultuur op Java.*

*Bijlagen van het Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1886-1887, Bijlage C, Kolonial Verslag van 1886, Suikercultuur op Java.*

*Bijlagen van het Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1887-1888, Bijlage C, Kolonial Verslag van 1887, Suikercultuur op Java.*

*Bijlagen van het Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1889-1890, Bijlage C, Kolonial Verslag van 1889, Suikercultuur op Java.*

*Bijlagen van het Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1891-1892, Bijlage C, Kolonial Verslag 1891, Suikercultuur op Java.*

*Bijlagen van het Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1900-1901, Bijlage C, Kolonial Verslag 1900, Suikercultuur op Java.*

*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, 1859, no. 6.

*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, 1859, no. 32.

### Buku dan Artikel

Ass, Svein, “Relevansi Teori Makro Chayanov Untuk Kasus Pulau Jawa” dalam Thomas J. Lindblad, “Tema-Tema Kunci dalam Sejarah Ekonomi Modern Indonesia” dalam Thomas J. Lindblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2000).

- Bernard, H. M. Vlekke, *Nusantara: Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008).
- Breman, Jan., *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Burger, D. H., *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, (terj. Prajudi Atmosudirjo), Djakarta: Pradnja Paramita, 1957.
- Furnivall, J. S., *Hindia Belanda: Studi Tentang Ekonomi Majemuk*, Jakarta: Freedom Institut, 2009.
- Mubyarto, *Masalah Industri Gula di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 1984.
- dkk, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.
- Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, *Potensi Kabupaten Sidoarjo*, Sidoarjo: Hubungan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo, 1994.
- Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991
- Soediono M. P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta: Gramedia, 1984.
- Suhartono, *Bandit-Bandit Pedesaan: Studi Historis 1850-1942 di Jawa*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Tim Penelusur Sejarah Sidoarjo, *Jejak Sidoarjo: dari Jenggala ke Suriname*, (Sidoarjo: Ikatan Alumni Pamong Praja Sidoarjo, 2006).
- Yasuo, Uemura “Perkebunan Tebu dan masyarakat pedesaan di jawa” dalam Akira Nagazumi, *Indonesia dalam kajian sarjana jepang: perubahan sosial ekonomi abad XIX dan XX dan berbagai Aspek Nasionalisme Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986).

### **Tesis dan Disertasi**

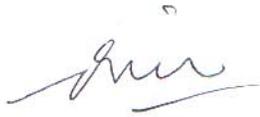
- Nasution, “Perkembangan Ekonomi Keresidenan Surabaya 1830-1930” ,*Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1998.

Sarjana Sigit Wahyudi, "Perkebunan Tebu dan Perubahan Sosial di Keresidenan Surabaya 1890-1937" *,Disertasi*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005.

Yogyakarta, 1 Desember 2015

Pembimbing

Penguji Utama



Dina Dwikumiarini, M. Hum.  
NIP. 1957209 198702 2 001

Mudji Hartono, M. Hum.  
NIP. 19550115 198403 1 001